

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA PROVINSI RIAU

*FINANCIAL STATISTICS OF VILLAGE GOVERNMENT
IN RIAU PROVINCE*

2021



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA PROVINSI RIAU

*FINANCIAL STATISTICS OF VILLAGE GOVERNMENT
IN RIAU PROVINCE*

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Statistik Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Riau 2021

Financial Statistics of Village Government in Riau Province 2021

ISBN: -

No. Publikasi/*Publication Number*: 14000.2254

Katalog/*Catalog*: 7203001.14

Ukuran Buku/*Book Size*: 21,59 X 27,94 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages*: viii + 44 halaman/pages

Naskah/*Manuscript*:

BPS Provinsi Riau/*BPS-Statistics of Riau Province*

Penyunting/*Editor*:

BPS Provinsi Riau/*BPS-Statistics of Riau Province*

Desain Kover oleh/*Cover Designed by*:

BPS Provinsi Riau/*BPS-Statistics of Riau Province*

Penerbit/*Published by*:

BPS Provinsi Riau/*BPS-Statistics of Riau Province*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purposes without permission from BPS-Statistics Riau Province

Tim Penyusun/ Team Members

Pengarah/ Director:

Drs. Misfaruddin, M.Si.

Penanggung Jawab/ Person in Charge:

Fitri Hariyanti, S.S.T., M.M.

Penyunting/ Editor:

Ir. Sugiarti, M.M.

Penulis dan Pengolah Data/ Author and Data Processing:

Etania Ranu Andhika, S.S.T., M.E., M.Sc.

Desain/Design:

Etania Ranu Andhika, S.S.T., M.E., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Riau 2021 merupakan publikasi yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan desa.

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten di Provinsi Riau selama 2020 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2021. Data tersebut merupakan hasil pengolahan dari Survei Statistik Keuangan Desa yang dilaksanakan pada responden desa terpilih pada 2021.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan para pemakai data, baik dari segi kecepatan penyajiannya maupun dari cakupan data/informasi. Untuk itu bantuan dan kerjasama dari berbagai instansi terutama Kepala Desa perlu ditingkatkan agar data yang disajikan pada publikasi mendatang menjadi lebih baik, lengkap, dan akurat.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data sehingga publikasi ini dapat disajikan. Akhirnya, saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, Desember 2022

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Riau



Drs. Misfaruddin, M.Si.

PREFACE

Financial Statistics of Village Government 2021 is a publication that is compiled and published by BPS-Statistics Riau Province to fulfil village financial statistics data needs.

The data and information in this publication contains Budget Realization of Village Government for 2020 and Budget of Village Government for 2021, both revenue and expenditure throughout Indonesia. The presented data are the results of survey on Village Financial Statistics at selected villages conducted in 2021.

We realize that the publication needs improvement to fulfil user needs due to limitation of input data to provide the current and various information. Cooperation among the agencies, especially the Chief of Villages, may improve the future publication.

We are thankful for everyone who have given their support so that this publication published. Constructive suggestions from the users are expected to improve the next publication.

Pekanbaru, December 2022

*Head of BPS-Statistics
of Riau Province*



Drs. Misfaruddin, M.Si.

DAFTAR ISI / CONTENTS

<i>KATA PENGANTAR/ PREFACE</i>	<i>iv</i>
<i>DAFTAR ISI / CONTENTS</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR TABEL / LIST OF TABLES</i>	<i>vii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR / LIST OF FIGURES</i>	<i>viii</i>
<i>BAB 1 PENDAHULUAN/ CHAPTER 1 PRELIMINARY</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang/ <i>Background</i>	<i>3</i>
1.2. Ruang Lingkup Survei/ <i>Scope of the Survey</i>	<i>3</i>
1.3. Tujuan/ <i>Purpose</i>	<i>4</i>
<i>BAB 2 KONSEP DAN DEFINISI/ CHAPTER 2 CONCEPT AND DEFINITION</i>	<i>5</i>
<i>BAB 3 METODOLOGI/ CHAPTER 3 METHODOLOGY</i>	<i>13</i>
<i>BAB 4 ULASAN RINGKAS/ CHAPTER 4 BRIEF DESCRIPTION</i>	<i>21</i>
4.1 Umum/ <i>General</i>	<i>23</i>
4.2 Keuangan Pemerintah Desa/ <i>Finance of Village Government</i>	<i>25</i>
4.2.1. Pendapatan Desa/ <i>Village Revenue</i>	<i>26</i>
4.2.2. Belanja Desa/ <i>Village Expenditure</i>	<i>29</i>
<i>LAMPIRAN/ APPENDIX</i>	<i>33</i>

DAFTAR TABEL / LIST OF TABLES

<i>Tabel/ Table 1</i>	<i>Relatif Standard Error (RSE) Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten di Provinsi Riau 2020-2021/ Relative Standard Error (RSE) Revenue and Expenditure Realization of Village Government by Regency throughout Riau Province, 2020-2021</i>	<i>19</i>
<i>Tabel/ Table 2</i>	<i>Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa Seluruh Riau Menurut Jenis Pedapatan (ribu rupiah)/ Revenue Realization of Village Government throughout Riau by Type of Revenue (thousand rupiah), 2020-2021</i>	<i>27</i>
<i>Tabel/ Table 3</i>	<i>Realisasi Belanja Pemerintah Desa Seluruh Riau Menurut Jenis Pedapatan (ribu rupiah)/ Expenditure Realization of Village Government throughout Riau by Type of Revenue (thousand rupiah), 2020-2021</i>	<i>30</i>

<https://riau.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR / LIST OF FIGURES

- Gambar/ Figure 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah)/ Revenue and Expenditure Realization of Village Government Throughout Riau Province (thousand rupiahs) 2020-2021 25*
- Gambar/ Figure 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah)/Revenue and Expenditure Realization of Village Government Throughout Riau Province (thousand rupiahs)2020-2021 27*

<https://riau.bps.go.id>

BAB 1 PENDAHULUAN

CHAPTER 1 PRELIMINARY

<https://riau.bps.go.id>



1.1. Latar Belakang

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Riau secara umum menyajikan gambaran ringkas mengenai realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Provinsi Riau dalam periode satu tahun anggaran. Data ini merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan potensi dan kemampuan keuangan desa untuk menunjang pembangunan desa.

Profil desa dan aparat desa serta kontribusi keuangan desa bagi dan dari pemerintahan yang lebih tinggi juga disajikan. Dengan demikian data atau informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan potensi keuangan dan arah pembangunan ekonomi di desa.

1.2. Ruang Lingkup Survei

Statistik Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Riau dikumpulkan melalui Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang dilaksanakan di seluruh kabupaten di Provinsi Riau. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Kuesioner K-3.

1.1. Background

Financial Statistics of Riau Province's Village Government Publication generally describes about Revenue and Expenditure Realization of the village government in the period of one fiscal year. The presented data can be used as one of indicator to reveal the potency and ability of village financial to support the development of the village.

This publication also presents information about the profile of the village and its officials, and also the contribution of village financial to and from the higher-level government. Accordingly, the information can be used to arrange the policy which is in line with the financial potency and direction of village economic development.

1.2. Scope of the Survey

The Financial Statistics of Village Government in Riau Province is collected through the Survey of Financial Statistics of Village Government which covered all regencies in Riau Province. The enumeration used K-3 questionnaire.

Berbeda dengan cara pengumpulan data keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara sensus (*complete enumeration*), pengumpulan data keuangan Pemerintah Desa dilakukan secara sampel (*sampling enumeration*) dengan jumlah desa sebanyak 185 desa.

1.3. Tujuan

Penyusunan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Riau bertujuan untuk:

- a. Menyajikan data Statistik Keuangan Pemerintah Desa dan perkembangannya pada setiap Kabupaten di Provinsi Riau.
- b. Mengetahui kinerja pengelolaan keuangan desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan keuangan desa pada setiap Kabupaten di Provinsi Riau.

Different with the data collection method of financial statistics of province and regency/municipality that conducted by a census, the village government finance data in Riau Province is collected by survey with the number of selected villages are 185 villages.

1.3. Purpose

The Riau Province Village Government Financial Statistics Publication aims to:

- a. Present Village Government Financial Statistics data and its development in each Regency in Riau Province.*
- b. Showing the performance of village financial management based on the effectiveness ratio and the ratio of village financial growth in each district in Riau Province.*

BAB 2 KONSEP DAN DEFINISI

CHAPTER 2 CONCEPT AND DEFINITION

<https://riau.bps.go.id>



Aparatur desa/nagari meliputi Kepala Desa/Wali Nagari, Sekretaris Desa/Nagari, Kepala Urusan, Kepala Dusun/Lingkungan /Jorong, dan staf lainnya.

Pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja tetap di desa/nagari dan tidak dipengaruhi dengan pergantian Kepala Desa/Wali Nagari. Biasanya pegawai ini berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Nagari terdiri atas:

Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. **Pendapatan Asli Desa** yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan desa yang bersifat PAD berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Misalnya dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain- lain.
2. **Dana Desa** adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pelaksanaan pembangunan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Village officials cover village chief, secretary of the village, the head of affairs, village/neighbourhood head, and other staff.

Permanent worker is a worker who works permanently at the village and not influenced by the turn of the chief of the village. Usually these employees are civil servant.

Revenue Realization of Village Government consists of:

Revenue of Village Government is all of cash revenues through village account for one fiscal year that is not paid back by village.

1. **Village Own-Source Revenue** is revenue of village authority based on origin and local scale which come from community and village environment. Village Own-Source Revenue consist of result of operations of the village, result of village asset, public-help support, participation and mutual help of rural communities, and others.
2. **Village Fund** is a fund from the state budget that is allocated to the village through the regency/municipality budget. Village fund is used for village administration, village development, village supervisory, and community empowerment.

3. **Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota** yaitu bagian pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintahan di atasnya. Sedangkan bagi hasil retribusi adalah pengembalian sebagian hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya.
4. **Alokasi Dana Desa** berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. **Bantuan Keuangan** adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
6. **Hibah** adalah pemberian sumbangan yang biasanya ditujukan bukan dalam rangka program-program Pemerintah Desa/Nagari. Dana ini dapat berasal baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, badan/lembaga/ organisasi swasta, maupun kelompok masyarakat /perorangan.
3. **Revenue Sharing Fund of Tax and Retribution of Regency/Municipality** is derived from the local tax revenue which is managed by the government on it. While, retribution share is the returns of the part of retributions by government on it, which is taken from the business and non-business activity of the village
4. **Allocation Funds for Village** is from the regency/municipality budget which is derived from Balanced Budget of Central and Local Finance that received by regency/municipality for village government, where the amount at least 10 percent after deducting the Special Allocation Fund.
5. **Financial Assistance** is a fund from the province/regency/municipality that intended for village government according to finance ability in the village.
6. **Grant** is a fund that given not in the context of village government programs purposes. This fund could be come from central government, province, regency /municipality government, agencies/institutions /organizations, or community groups/ individuals.

Realisasi Belanja Pemerintah Desa terdiri dari:

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa

Expenditure Realization of Village Government consists of:

Expenditure of Village Government is all the village government spending through village account for one fiscal year that is not derived back by village. It is used to fund the implementation of village authority

Village Administration Sector

Village Administration Sector consists of:

- a. *Determination and confirmation village boundaries*
- b. *Village data collection*
- c. *Village spatial arrangement*
- d. *Village discussion*
- e. *Village information management*
- f. *Implementation of village planning*
- g. *Evaluation of village development*
- h. *Cooperation between villages*
- i. *Construction of facilities and infrastructure of village office*
- j. *Other activities related to village's condition.*

Village Development Sector consists of:

- a. *Development, utilization and maintenance of infrastructure and village environment*

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan
- e. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
- f. Pelestarian lingkungan hidup

- b. Development, utilization and maintenance of health infrastructure*
- c. Development, utilization and maintenance of education and culture*
- d. Expansion of productive business*
- e. Utilization and maintenance of business infrastructure*
- f. Preservation of environment*

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

antara lain:

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pembinaan lembaga adat
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa

Community Supervisory Sector consists of:

- a. Supervisory of social institutions*
- b. Implementation of peace and order*
- c. Supervisory of religious harmony*
- d. Procurement of sport infrastructure*
- e. Supervisory of tradition institution*
- f. Development of art, socio-cultural*
- g. Other activities*

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat

Community Empowerment Sector consists of:

- a. Training of economic, agriculture, fishery, and trading business
- b. Training of efficient technology
- c. Education, training, and counselling of village chief, village officials, and village council
- d. Enhancement of community

Bidang Tak Terduga

Bidang ini terdiri dari penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Unpredicted Sector

This sector consists of management of Disaster, Emergencies, and Urgent.

<https://riau.bps.go.id>

BAB 3 METODOLOGI

CHAPTER 3 METHODOLOGY

<https://riau.bps.go.id>



Desain sampling dalam Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa meliputi:

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam survei ini adalah daftar desa hasil MFD Online 2020 Semester 1 yang telah diklasifikasikan menurut kategori urban rural berdasarkan PODES Tahun 2020. Sebelum dilakukan pemilihan sampel, desa dalam kerangka sampel dikelompokkan ke dalam 2 lapisan (strata), yaitu: strata 1, terdiri dari desa daerah perkotaan (urban), dan strata 2, terdiri dari desa daerah perdesaan (rural).

2. Alokasi Sampel

Besarnya sampel desa untuk masing-masing provinsi sejumlah kurang lebih 10 % dari jumlah desa di provinsi tersebut. Sedangkan untuk jumlah desa per kabupaten dialokasikan secara independent untuk masing-masing strata secara proporsional terhadap jumlah desa di masing-masing kabupaten.

3. Prosedur Pemilihan Sampel

Survei Keuangan Tingkat Desa ini menerapkan sampling berlapis. Pemilihan sampel desa untuk setiap kabupaten pada masing-masing strata dilakukan secara independent. Pemilihan sampel desa/kelurahan baik pada strata 1 maupun strata 2 dilakukan dengan sampling sistematis.

The sampling design in the Financial Village Government Statistics Survey includes:

1. Sampling Frame

The sample frame used in this survey is a list of villages from the 2020 MFD Online which have been classified according to the urban rural category based on the PODES 2020. Before selecting the sample, the villages in the sample frame were grouped into 2 layers (strata), namely: stratum 1, consisting of urban areas (urban), and stratum 2, consisting of rural areas (rural).

2. Sample Allocation

The sample size of villages for each province is approximately 10% of the total number of villages in the province. Meanwhile, the number of villages per district is allocated independently for each stratum in proportion to the number of villages in each district.

3. Sample Selection Procedure

This Village Level Financial Survey applies layered sampling. The selection of village samples for each district/city in each stratum was carried out independently. The sample selection of villages in both stratum 1 and stratum 2 was carried out by systematic sampling.

4. Prosedur Estimasi

Prosedur estimasi karakteristik sesuai desain survei yang diaplikasikan dan tidak dibedakan menurut kabupaten, daerah perkotaan dan pedesaan.

Estimasi total karakteristik pada level kabupaten adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = N \sum_{h=1}^2 W_h \bar{y}_h$$

dengan:

$$\bar{y}_h = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}$$

adalah perkiraan rata-rata suatu karakteristik pada level kabupaten di strata h. Dan,

$$W_h = \frac{N_h}{N}$$

adalah penimbang untuk strata ke h. Sedangkan estimasi ragam dari estimasi total suatu karakteristik pada level kabupaten adalah:

$$\begin{aligned} v(\hat{Y}) &= N^2 \sum_{h=1}^2 W_h^2 \frac{N_h - n_h s_h^2}{N_h} \\ &= N^2 \sum_{h=1}^2 W_h^2 (1 - f_h) \frac{s_h^2}{n_h} \end{aligned}$$

dengan,

$$s_h^2 = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} (y_{hi} - \bar{y}_h)^2$$

4. Estimation Procedure

The procedure for estimating characteristics is according to the survey design applied and is not differentiated by district, urban and rural areas.

The estimated total characteristics at the district level are as follows:

$$\hat{Y} = N \sum_{h=1}^2 W_h \bar{y}_h$$

with:

$$\bar{y}_h = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}$$

is the average estimate of a characteristic at the district level in strata h. And,

$$W_h = \frac{N_h}{N}$$

is the weight for the hth stratum. Meanwhile, the estimation of variance from the total estimate of a characteristic at the district level is:

$$\begin{aligned} v(\hat{Y}) &= N^2 \sum_{h=1}^2 W_h^2 \frac{N_h - n_h s_h^2}{N_h} \\ &= N^2 \sum_{h=1}^2 W_h^2 (1 - f_h) \frac{s_h^2}{n_h} \end{aligned}$$

with,

$$s_h^2 = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} (y_{hi} - \bar{y}_h)^2$$

adalah perkiraan ragam suatu karakteristik pada level kabupaten di strata h . Di mana,

h : strata, 1 = perkotaan; 2 = pedesaan

y_{hi} : Nilai karakteristik pada desa i strata ke h .

N : Banyaknya populasi desa tingkat kabupaten

N_h : Banyaknya populasi desa tingkat kabupaten di strata h .

n_h : Banyaknya sampel desa tingkat kabupaten di strata h .

5. Tingkat Akurasi

Standard error merupakan ukuran akurasi dari suatu prediksi dalam survei. Secara sederhana, standard error diartikan sebagai keragaman tiap-tiap nilai amatan dari rata-rata sampel. Ukuran statistik ini dapat melihat akurasi penduga sampel terhadap parameter populasi.

Standard error dipengaruhi oleh banyaknya sampel. Semakin banyak sampel maka nilainya semakin kecil, yang berarti sampel semakin representatif (mewakili) terhadap populasinya. Namun, standard error memiliki keterbatasan yaitu sangat dipengaruhi oleh satuan data yang diamati, sehingga sulit mendapatkan keterbandingan antara dua kelompok data yang mempunyai satuan berbeda.

is an estimate of the variance of a characteristic at the district level in strata h . When,

h : strata, 1= urban; 2= rural

y_{hi} : Characteristic values in i village at h^{th} stratum.

N : The number of village population at the district level.

N_h : The number of village population at the district/city level in the h strata.

n_h : The number of sample villages at the district level in the h strata

5. Accuration Rate

The standard error is a measure of the accuracy of a prediction in a survey. In other word, the standard error is defined as the diversity of each value of sample to the average of total sample. These statistics can be used to measure the accuracy of estimation to the population parameters.

The standard error is influenced by a number of samples. The higher number of samples will lead to the smaller value of standard error, because the sample is more representative to the population. However, the standard error has limitations, it is strongly influenced by unit measurement of data observation. Therefore, it is difficult to get comparability between two data sets that have a different unit of measurement.

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}}$$

$$SE = \frac{Sd}{\sqrt{n}}$$

Dimana :

Sd = Standar deviasi
 n = banyaknya sampel
 y_i = nilai amatan
 SE = Standar Error

Where :

Sd = Standard Deviation
 n = number of samples
 y_i = value of observation
 SE = Standard Error

Dengan keterbatasan ini, relative standard error dapat digunakan sebagai alternatif. *Relative Standard Error (RSE)* merupakan ukuran keragaman yang telah dibakukan dengan satuan persen. Persentase yang semakin kecil menunjukkan bahwa semakin kecil pula keragaman dalam suatu amatan. RSE memiliki tiga kriteria penilaian, apabila RSE kurang dari 25 persen maka hasil estimasi sudah baik, RSE diantara 25-50 persen cukup baik, dan RSE diatas 50 persen mengindikasikan bahwa hasil estimasi kurang baik.

With this limitation, the relative standard error can be used as an alternative. Relative Standard Error (RSE) is a measure of the diversity that has been standardized with measurement units in percentage. The smaller percentage means less of diversity within an observation. RSE has three criteria in measuring the estimation i.e., 1) RSE less than 25 percent, which means the estimation is good, 2) RSE between 25-50 percent is quite good, and 3) RSE above 50 percent indicates that the estimation is not good enough.

$$RSE = \frac{SE}{\bar{x}} \times 100\%$$

dimana :

SE = Standard error
 \bar{x} = rata-rata sampel
 RSE = Relative Standard Error

where :

SE = Standard error
 \bar{x} = mean of sample
 RSE = Relative Standard the Error

Tabel 1 *Relative Standard Error (RSE) Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten di Provinsi Riau 2020-2021*

Table 1 *Relative Standard Error (RSE) Revenue and Expenditure Realization of Village Government by Regency throughout Riau Province, 2020-2021*

Kabupaten/Regency	2020		2021*	
	Pendapatan/ Revenue	Belanja/ Expenditure	Pendapatan/ Revenue	Belanja/ Expenditure
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 KUANTAN SINGINGI	22,76	22,76	23,05	23,07
2 INDRAGIRI HULU	23,62	23,74	23,22	23,27
3 INDRAGIRI HILIR	23,67	23,77	23,8	23,71
4 PELALAWAN	28	28,24	28,23	28,23
5 S I A K	24,62	24,69	24,58	24,66
6 KAMPAR	21,92	21,92	21,77	21,77
7 ROKAN HULU	24,37	24,48	24,41	24,41
8 BENGKALIS	23,79	23,79	23,77	23,75
9 ROKAN HILIR	23,71	23,78	23,78	23,78
10 KEPULAUAN MERANTI	27,64	27,81	27,45	27,42
RIAU	7,67	7,72	7,72	7,73

*) APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

BAB 4 ULASAN RINGKAS

CHAPTER 4 BRIEF DESCRIPTION

<https://riau.bps.go.id>



4.1 Umum

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud.

Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib.

Terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di Kabupaten/Kota. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum.

4.1 General

Village is one of the bases and sources of governance implementation and development. Implementation of the village government has been arranged since 1979, through Law No. 5 1979, of Village Government. Village as the smallest unit of government can start to take a significant role in development. If development of the country has been started at the village level, so that the goal of the fair development and reduce inequality will be achieved.

Village is expected to not only able to drive people to participate in development, but also be able to deliver village administration services and be able to manage village finances well and orderly.

The Law No. 32/2004 of Regional Government is a policy that has given recognition to the local diversity, as well as open the space for the growth of democratic and decentralization of rural although the focus of autonomy still laid in the Regency/Municipality. Village is no longer seen as the lowest form of government under the sub-district but it is treated as a legal public entity government.

Implikasinya adalah desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten.

UU No. 32/2004 tersebut juga telah mendorong proses demokratisasi di tingkat desa. Masyarakat desa sekarang jauh lebih kritis menuntut kinerja Kepala Desa yang lebih akuntabel dan transparan dalam mengelola kebijakan dan keuangan desa. Kelahiran Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi aktor baru pendorong demokrasi, yang mengurangi dominasi “penguasa tunggal” Kepala Desa.

Setiap tahun, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui musyawarah dan mufakat perwakilan masyarakat desa dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD). APBDesa merupakan rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintah Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan, dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

Pemerintah sudah mengeluarkan permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai acuan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya.

The implication is that the villages are entitled to make their own regulations to manage public good and rural life, as long as it has not been established by the Municipality.

Law no. 32/2004 also has encouraged the democratization process at the village level. The community of the village are now much more mindful in demanding the good performance of village chief in managing the financial and policies of village. The presence of the village assembly (BPD) become a new actor to drive democracy, which reduces the dominance of "single master" of village chief.

Every year, the village chief sets Budget Village (APBDesa) through deliberation and consensus of village representatives in the Village Consultative Organization (LMD). APBDesa is an annual operating plan of the general program of village government and implemented into numbers of rupiah that shows the estimation of revenue targets in the one side and the estimation of upper limit of the village's financial outlay in other side.

The government also issued Regulation No. 113 of 2014 concerning the financial management of the village as a reference for the village government in managing its finances.

Pemerintah juga menerbitkan UU desa yang baru yaitu UU No 6 tahun 2014 dengan tujuan agar pemerintah desa lebih memiliki posisi yang penting dalam pembangunan.

4.2 Keuangan Pemerintah Desa

APBDesa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDesa tahun anggaran berikutnya sudah harus dibuat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berjalan. APBDesa merinci seluruh Pendapatan dan Belanja baik rutin maupun pembangunan sebagai pencerminan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama oleh aparat dan masyarakat desa.

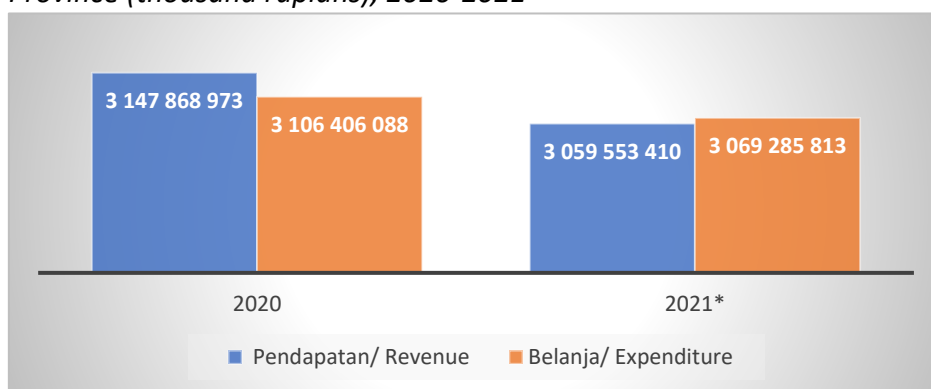
The government then also issued new village regulation, UU No. 6 in 2014, in order to strengthen the position of the village government in the development.

4.2 Finance of Village Government

Budget Village (APBDesa) is a village regulation that contains sources of village revenue and expenditure allocations within one year. The APBDesa draft is discussed in the village development planning deliberation. Budget Village (APBDesa) for the next fiscal year must be made in form of the Village Revenue and Expenditure Budget for the current year. The APBDesa details all income and expenditures, both routine and development, as reflection of the planned activities to be carried out jointly by the village apparatus and community.

Gambar 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2020-2021

Figure 1. Revenue and Expenditure Realization of Village Government Throughout Riau Province (thousand rupiahs), 2020-2021



*) APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Jika dilihat pada APBDesa 2021, maka pendapatan yang ditargetkan menurun dari realisasi pendapatan seluruh Pemerintah Desa selama 2020. Pada 2021, total pendapatan yang ditargetkan seluruh pemerintah desa se Riau mencapai 3,06 triliun rupiah, sementara realisasi pendapatan pada 2020 mencapai 3,15 triliun rupiah.

Pada sisi lain, pemerintah desa se-Riau menargetkan belanja selama 2021 sebesar 3,07 triliun rupiah. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan realisasi belanja pada 2020 yang mencapai 3,11 triliun rupiah.

4.2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan desa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan desa meliputi 3 komponen utama yaitu: pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

From the 2021 APBDesa, the targeted revenue decrease from the realization of the entire village government's revenue during 2020. In 2021, the total targeted revenue for all village governments reach 3.06 trillion rupiah, while the realization of revenue in 2020 will reach 3.15 trillion rupiah.

On the other hand, village governments throughout Riau are targeting expenditure for 2021 of 3.07 trillion rupiah. This number decreased from the realization of expenditure in 2020 which reached 3.11 trillion rupiah.

4.2.1 Village Revenue

Village revenue budgeted in the APBDes is basically an estimate of rationally measured village revenues that can be achieved for each existing source of income. Village revenue includes 3 main components, namely: village own source revenue, transfer revenue and other revenue.

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa Seluruh Riau Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2021

Table 2 Revenue Realization of Village Government throughout Riau by Type of Revenue (thousand rupiah), 2020-2021

Rincian/ Items (1)	2020 (2)	2021*) (3)
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Revenue</i>	21 245 611	24 181 345
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	3 109 248 503	3 025 761 353
2.1 Dana Desa <i>Village Funds</i>	1 608 659 529	1 641 821 462
2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	59 423 715	63 424 747
2.3 Alokasi Dana Desa <i>Village Allocation Funds</i>	1 255 715 705	1 226 268 494
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	156 896 553	47 530 152
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	28 553 001	46 716 498
3. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	17 374 859	9 610 712
JUMLAH PENDAPATAN / TOTAL REVENUE	3 147 868 973	3 059 553 410

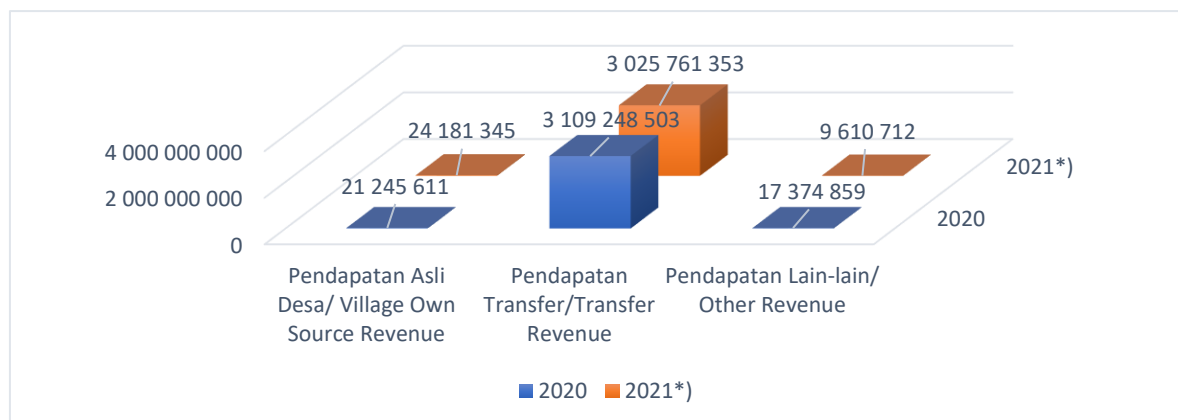
*) APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Gambar 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Riau (ribu rupiah), 2020-2021

Figure 2 Revenue and Expenditure Realization of Village Government Throughout Riau Province (thousand rupiahs), 2020-2021



*) APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Pendapatan asli desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber dana potensial desa. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli desa terhadap total pendapatan desa, maka semakin tinggi tingkat kemandirian desa tersebut.

Jumlah pendapatan asli desa pada target penerimaan pendapatan seluruh desa pada 2021 mencapai 24,18 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan realisasi pendapatan asli desa pada 2020 sebesar 21,25 miliar rupiah.

Pendapatan transfer merupakan anggaran yang diterima pemerintah desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kelompok Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten.

Realisasi pendapatan transfer seluruh desa se-Riau pada 2020 mencapai 3,11 triliun rupiah. Namun pada 2021 target pendapatan transfer turun menjadi sebesar 3,03 triliun rupiah. Penurunan target ini terjadi karena penurunan target penerimaan alokasi dana desa dan bantuan keuangan dari provinsi.

The village's own source revenue reflects the ability of the village government to explore village's potential funds. The higher the contribution of the village own source revenue to the village's total revenue, the higher the village's level of autonomy.

The village's own source revenue target for all villages in 2021 reaches 24.18 billion rupiah. This number has increased compared to the realization of village's own source revenue in 2020 of 21.25 billion rupiah.

Transfer revenue is the budget received by the village government to fund the implementation of village administration, village development, village community development, and village community empowerment. The Transfer Revenue Group consists of Village Funds (DD), Sharing Fund of Tax and Retribution, Village Allocations Fund (ADD), Provincial Financial Assistance, and District Financial Assistance.

The realization of transfer revenue for all villages in Riau in 2020 reached 3.11 trillion rupiah. However, in 2021 the transfer revenue target dropped to IDR 3.03 trillion. The decrease in this target occurred due to a decrease in the target of receiving village allocations fund and provincial financial assistance.

Dana desa dan alokasi dana desa memiliki kontribusi besar dalam pendapatan transfer. Pada 2020 jumlah dana desa yang diterima mencapai 1,61 triliun rupiah dan ditargetkan naik menjadi 1,64 triliun rupiah pada 2021. Sementara itu alokasi dana desa juga ditargetkan menurun menjadi 1,23 triliun rupiah pada 2021 dibandingkan realisasi pada 2020 yang sebesar 1,26 triliun rupiah. Komponen bagi hasil pajak & retribusi ditargetkan meningkat pada 2021 menjadi sebesar 63,42 miliar rupiah dibandingkan periode sebelumnya yang dapat direalisasikan sebesar 59,42 miliar rupiah.

4.2.2. Belanja Desa

Belanja Pemerintah Desa dibagi dalam lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Village funds and village allocations fund have a major contribution to transfer revenue. In 2020 the number of village funds received reached 1.61 trillion rupiahs and was targeted to increase to 1.64 trillion rupiahs in 2021. Meanwhile the allocation of village funds was also targeted to decrease to 1.23 trillion rupiahs in 2021 compared to the realization in 2020 which amounted to 1.26 trillion rupiahs. The revenue-sharing component for taxes & retribution was targeted to increase in 2021 to 63.42 billion rupiah compared to the previous period which could be realized at 59.42 billion rupiah.

4.2.2 Village Expenditure

Village government spending is divided into five areas, namely village administration sector, village development sector, community supervisory sector, community empowerment sector, unpredicted sector.

Tabel 3 Realisasi Belanja Pemerintah Desa Seluruh Riau Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020-2021

Table 3 Expenditure Realization of Village Government throughout Riau by Type of Revenue (thousand rupiah), 2020-2021

Rincian/ Items	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	1 168 945 758	1 171 265 689
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	1 046 743 410	994 917 017
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	202 332 963	204 452 007
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	83 904 921	154 781 466
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	604 479 036	543 869 634
JUMLAH/TOTAL	3 106 406 088	3 069 285 813

*) APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

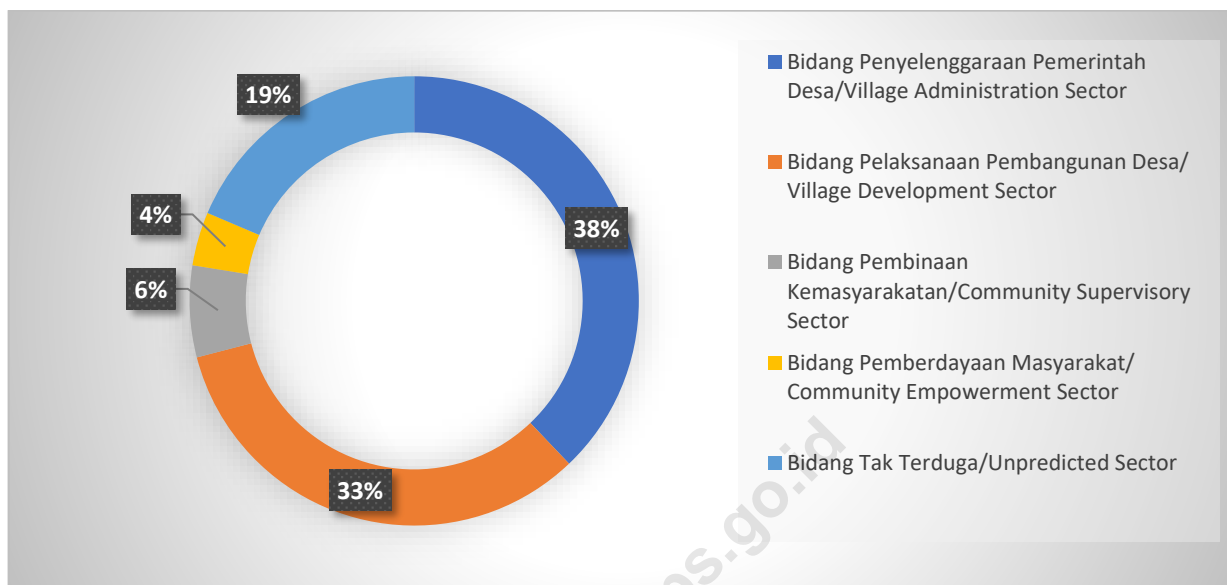
Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa memberikan kontribusi terbesar belanja desa pada 2020 dan 2021. Realisasi belanja pelaksanaan pembangunan desa 2020 mencapai 1,17 triliun rupiah dan target pada 2021 adalah sama yaitu sebesar 1,17 triliun rupiah. Bidang pelaksana pembangunan desa berada pada urutan kedua dalam berkontribusi terhadap belanja desa. Pada 2020, realisasi belanja pelaksana pembangunan desa mencapai 1,05 triliun rupiah dan target pada 2021 sebesar 0,99 triliun.

Village administration sector provides the largest contribution to village expenditures in 2020 and 2021. Realization of village administration sector expenditures reached 1.17 trillion rupiah in 2020 and the target in 2021 was at the same level, 1.17 trillion rupiah. The village development sector is in second place in contributing to village expenditure. In 2020, the realization of village development sector expenditure reached 1.05 trillion rupiah and the target in 2021 was 0.99 trillion rupiah.

Gambar 3 Komposisi Belanja Pemerintah Desa Seluruh Riau Menurut Jenis Pendapatan (persentase), dari 2020 hingga 2021*

Figure 3 Expenditure Composition of Village Government Throughout Riau by The Types of Expenditure (percentage), from 2020 to 2021*



*) APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

LAMPIRAN

APPENDIX

<https://riau.bps.go.id>



Tabel 3 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021

Table 3 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Kuantan Singingi, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	311 990 766	286 449 079
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	3 327 474	3 754 252
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	308 194 536	282 314 299
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	184 668 295	186 039 294
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	5 403 534	6 567 329
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	95 499 840	77 621 009
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	22 622 867	12 086 667
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	0	0
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	468 756	380 528
II. BELANJA		
EXPENDITURE	306 952 137	282 315 364
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	106 826 813	95 889 999
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	76 519 908	49 710 206
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	12 149 175	15 609 715
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	19 388 411	31 948 623
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	92 067 830	89 156 821

*APBDesa

Sumber: *Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)*

Source: *Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)*

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021

Table 4 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Indragiri Hulu, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	305 919 413	284 833 743
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	1 651 709	397 906
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	304 238 929	283 996 326
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	183 090 659	175 585 436
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	4 185 975	3 686 645
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	101 053 128	102 326 602
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	15 909 167	881 214
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	0	1 516 429
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	28 775	439 511
II. BELANJA		
EXPENDITURE	299 775 730	283 248 370
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	104 451 624	112 084 885
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	122 904 925	89 855 277
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	18 849 925	8 223 820
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	10 401 770	11 291 512
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	43 167 486	61 792 876

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Tabel 5 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021

Table 5 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Indragiri Hilir, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	402 438 430	356 760 072
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	1 198 189	943 485
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	401 223 295	355 804 777
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	214 535 280	222 823 620
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	4 191 331	3 986 372
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	160 898 559	127 657 285
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	21 598 125	1 337 500
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	0	0
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	16 946	11 810
II. BELANJA		
EXPENDITURE	380 201 606	371 036 013
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	131 077 455	127 604 471
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	157 035 163	145 779 437
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	30 414 403	20 378 580
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	2 171 371	13 299 465
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	59 503 214	63 974 060

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Tabel 6 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021

Table 6 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Pelalawan, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	231 098 229	205 773 126
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	2 398 414	1 286 413
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	222 112 670	204 486 713
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	113 637 563	118 719 395
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	5 919 243	0
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	92 525 864	85 767 318
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	10 030 000	0
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	0	0
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	6 587 145	0
II. BELANJA		
EXPENDITURE	216 909 903	216 819 829
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	80 299 919	72 770 666
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	67 196 488	81 049 404
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	18 118 655	9 877 405
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	2 907 124	8 913 001
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	48 387 717	44 209 353

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Siak Provinsi Riau (Ribuan Rupiah), 2020-2021
 Table 7 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Siak, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	289 753 480	264 940 412
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	1 141 060	1 638 093
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	288 436 070	262 917 869
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	117 556 594	116 356 224
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	13 264 365	14 943 793
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	141 027 339	124 311 491
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	10 460 227	358 461
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	6 127 545	6 947 900
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	176 350	384 450
II. BELANJA		
EXPENDITURE	279 221 870	284 068 676
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	111 982 066	120 002 500
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	92 180 020	95 725 002
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	20 137 106	28 000 860
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	6 132 138	7 842 421
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	48 790 540	32 497 893

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Tabel 8 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021

Table 8 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Kampar, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	418 116 221	387 290 291
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	5 258 722	9 143 466
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	411 566 267	376 660 425
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	225 833 533	231 948 520
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	14 543 378	16 372 965
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	142 567 356	115 668 614
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	21 489 500	8 324 188
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	7 132 500	4 346 138
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	1 291 232	1 486 400
II. BELANJA		
EXPENDITURE	400 994 712	355 313 736
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	141 311 881	125 218 921
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	138 171 403	116 534 256
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	7 792 401	10 072 487
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	12 423 749	28 874 032
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	101 295 278	74 614 040

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Tabel 9 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021
 Table 9 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Rokan Hulu, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	265 352 343	260 686 620
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	4 562 964	5 174 696
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	259 541 357	254 207 471
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	141 875 143	149 840 507
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	5 848 006	5 018 219
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	95 621 541	89 982 515
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	16 196 667	6 460 199
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	0	2 906 031
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	1 248 022	1 304 453
II. BELANJA		
EXPENDITURE	267 578 694	260 971 229
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	98 692 766	106 607 510
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	85 910 131	84 497 597
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	20 874 362	15 703 192
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	9 943 274	17 633 282
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	52 158 161	36 529 648

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Tabel 10 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021

Table 10 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Bengkalis, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
III. PENDAPATAN		
REVENUE	420 724 350	450 232 881
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	1 665 895	1 561 781
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	418 234 112	447 827 059
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	150 259 210	152 337 081
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	6 067 883	10 893 242
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	233 439 063	245 991 736
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	13 175 000	7 605 000
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	15 292 956	31 000 000
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	824 343	844 041
IV. BELANJA		
EXPENDITURE	456 843 653	458 426 832
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	216 470 029	220 065 576
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	129 928 101	133 877 224
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	43 265 990	47 478 526
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	6 833 516	10 885 953
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	60 346 017	46 119 553

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

Tabel 11 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021
 Table 11 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Rokan Hilir, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	328 998 361	385 449 263
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	2 483	71 586
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	328 434 297	384 536 158
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	174 649 368	182 664 225
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	0	1 956 182
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	136 954 929	198 738 828
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	16 830 000	1 176 923
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	0	0
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	561 581	841 519
II. BELANJA	330 593 826	387 566 566
EXPENDITURE		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	127 162 829	134 173 719
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	117 202 370	151 239 859
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	14 153 604	34 388 575
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	9 144 104	14 151 809
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	62 930 919	53 612 604

*APBDesa

Sumber: *Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)*

Source: *Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)*

Tabel 12 Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Ribu Rupiah), 2020-2021

Table 12 Revenue And Expenditure Realization Of Village Government Of Kepulauan Meranti, Riau, 2020-2021 (Thousand Rupiah)

Rincian/ Item	2020	2021*
(1)	(2)	(3)
I. PENDAPATAN		
REVENUE	173 477 380	177 137 923
1. Pendapatan Asli Desa <i>Village Own Source Reveniew</i>	38 701	209 667
2. Pendapatan Transfer <i>Transfer Revenue</i>	167 266 970	173 010 256
2.1. Dana Desa <i>Village Funds</i>	102 553 884	105 507 160
2.2. Bagi Hasil Pajak & Retribusi <i>Sharing Fund of Tax and Retribution</i>	0	0
2.3. Alokasi Dana Desa <i>Village Alocation Funds</i>	56 128 086	58 203 096
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi <i>Financial Assistance Province</i>	8 585 000	9 300 000
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten <i>Financial Assistance Regency</i>	0	0
2.6. Pendapatan Lain-lain <i>Other Revenue</i>	6 171 709	3 918 000
II. BELANJA		
EXPENDITURE	167 333 957	169 519 198
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa <i>Village Administration Sector</i>	50 670 376	56 847 442
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <i>Village Development Sector</i>	59 694 901	46 648 755
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan <i>Community Supervisory Sector</i>	16 577 342	14 718 847
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat <i>Community Empowerment Sector</i>	4 559 464	9 941 368
5. Bidang Tak Terduga <i>Unpredicted Sector</i>	35 831 874	41 362 786

*APBDesa

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 (diolah)

Source: Financial Statistics of Village Government 2021 (processed)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

ENLIGHTEN THE NATION



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

BPS-Statistics of Riau Province

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru 28131

Telp.(0761) 23042 Fax.(0761) 21336

Homepage://riau.bps.go.id E-mail: bps1400@bps.go.id